

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah unsur yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan nasional dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana, sistematis, komprehensif dan bertanggung jawab. Salah satu tujuan dari kegiatan pariwisata adalah untuk melestarikan sumber daya, lingkungan, dan alam. Hal ini dilakukan dengan berpegang pada prinsip menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat lokal, serta memastikan adanya integrasi antara berbagai sektor, daerah, dan pusat yang membentuk satu kesatuan sistemik dalam konteks otonomi daerah dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan.

Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan memiliki beragam keindahan alam dan menawarkan berbagai pemandangan panorama yang memukau. Bahkan lembaga situs analisis survei asal Inggris [money.co.uk](https://www.money.co.uk) menobatkan Indonesia sebagai negara terindah dengan skor 7,77 (Haqqi, 2022). Indonesia menempati peringkat pertama dengan panorama alam terbanyak dan terbaik 49 negara lain seperti Selandia Baru, Jepang dan Perancis pun kalah.

Potensi pariwisata yang ada di Indonesia ini bukan hanya sekadar daya tarik bagi wisatawan lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara. Pariwisata pun telah berkembang menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, pengembangan pariwisata juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Manajemen publik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pariwisata dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan peraturan yang mendukung, dan harus berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang terencana dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Tujuan pengembangan pariwisata adalah meningkatkan kualitas dan daya tarik objek wisata supaya dapat menarik perhatian wisatawan. Manajemen pengembangan pariwisata bukan hanya berfokus pada daya tarik, objek, dan kawasan, melainkan juga pada wisatawan dan elemen pendukungnya. Keberhasilan dan efektivitas pariwisata sangat bergantung pada pengelolaan yang tepat dari berbagai unsur pendukung tersebut.

Salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan wisatanya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY merupakan salah satu kota tujuan wisata di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara (Prastiyanti & Yulianto, 2019). Tidak hanya dikenal sebagai kota perjuangan, pusat kebudayaan, dan pusat pendidikan, tetapi juga terkenal akan kekayaan pesona alam dan budayanya (Mali, 2021). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak wisatawan datang ke DIY sebagai tujuan wisata

mereka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY masuk ke dalam sepuluh besar Provinsi Tujuan Wisatawan Nusantara Terbanyak periode Januari 2023 sampai September 2023. Selain menjadi salah satu provinsi tujuan wisatawan nusantara DIY juga menjadi salah satu provinsi dengan kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data BPS, DIY menjadi provinsi dengan kunjungan wisatawan mancanegara ketujuh pada tahun 2022.

Kabupaten Gunungkidul, sebagai salah satu bagian penting dari DIY, turut berkontribusi dalam pencapaian ini. Dengan keindahan pantai-pantai eksotis, goa-goa alami yang menakjubkan, serta keragaman budaya yang kaya, Gunungkidul telah menjadi magnet bagi wisatawan. Selama sepuluh tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,9% antara tahun 2011 sampai 2019. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012, mencapai 38,4%. (Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2022). Prestasi ini tidak hanya memperkuat citra DIY sebagai destinasi unggulan, tetapi juga mengukuhkan posisi Gunungkidul sebagai salah satu tujuan wisata yang menarik di Indonesia.

Salah satu destinasi wisata di Gunungkidul adalah Telaga Jonge, yang berada di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul. Telaga Jonge ini merupakan telaga alami yang terkenal di Gunungkidul dan memiliki potensi wisata yang besar. Air di telaga ini jernih dan tidak pernah kering meskipun kemarau panjang terjadi di Gunungkidul bahkan hampir dua tahun. Kemudian, terdapat sejarah unik mengenai Telaga Jonge, nama tersebut berasal dari nama Kyai Jonge sesepuh desa. Kyai Jonge adalah seorang prajurit dari Majapahit yang

terdampar di pantai selatan Gunungkidul. Setelah berhasil selamat, ia singgah di beberapa lokasi sebelum akhirnya menetap di Desa Pacarejo, di mana ia wafat di tengah telaga.

Potensi wisata Telaga Jonge ini juga didukung dengan bermacam-macam atraksi diantaranya atraksi alam yaitu Telaga Jonge sendiri, atraksi buatan seperti wahana kano, perahu, dan sepeda klasik, serta atraksi budaya seperti pasar kuliner tradisional, doger, jathilan, reog, dan sebagainya. Daya tarik utamanya adalah Destinasi Digital dan Pasar Digital. Destinasi Digital adalah destinasi *Cameragenic* atau *instagramable* yang dikreasikan anak-anak Generasi Pesona Indonesia (Genpi) (Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2020).

Gambar 1.1

Pasar Digital dan Koin Telaga Jonge



Sumber: [instagram.com/nur.hanifah.ahmad](https://www.instagram.com/nur.hanifah.ahmad), 2024

Selain Destinasi digital adapula Pasar Digital. Pasar Digital Telaga Jonge menghadirkan berbagai kuliner tradisional dan makanan lokal, serta menyajikan

pertunjukan kesenian daerah. Keunikan dari pasar ini adalah penggunaan koin persegi dari kayu sebagai alat pembayaran. Koin tersebut, yang bernilai Rp. 2.000,00 per satuan, dapat ditukar di loket yang berada di Telaga Jonge. Hanya pada hari Sabtu dan Minggu uang Jonge tersebut dapat digunakan, sementara untuk hari-hari lainnya, transaksi dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah (Sorot Gunungkidul, 2023). Menu yang ditawarkan di pasar lempar meliputi soto batok, pecel, nasi bakar, tempe manding, es jaipong, thiwul, dan lain-lain. Penggunaan koin kayu persegi sebagai alat pembayaran bertujuan untuk memberikan pengalaman unik dan tradisional bagi pengunjung sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri dan menciptakan suasana yang berbeda di pasar tersebut. Pengunjung juga dapat menyewa kapal kano dengan harga Rp10.000 per orang untuk mengelilingi telaga.

Gambar 1.2

Wahana perahu kano



Sumber: Tribun Jogja, 2023

Telaga Jonge merupakan salah satu objek wisata utama di Desa Pacarejo, yang menarik banyak pengunjung dengan jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi

di kawasan tersebut. (Romadhoni & Prakoso, 2023). Berikut adalah data jumlah kunjungan wisatawan Telaga Jonge dari tahun 2017 hingga tahun 2022.

Tabel 1.1

Jumlah Kunjungan Wisatawan Telaga Jonge

TAHUN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
2017	70.657	20,7
2018	68.563	20
2019	63.624	18,6
2020	30.112	8,8
2021	48.367	14,1
2022	60.739	17,8
JUMLAH	342.062	100

Sumber: Kelompok Usaha Pariwisata Telaga Jonge, 2023

Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021 terjadi penurunan jumlah wisatawan. Di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan drastis karena pandemi Covid-19 puncak penurunannya di tahun 2021. Kemudian tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah wisatawan yang cukup signifikan tetapi belum mencapai jumlah kunjungan seperti tahun 2017. Selain itu, Desa Wisata Pacarejo telah masuk kategori desa wisata maju dari Kemenparekraf (Jadesta, 2023).

Penelitian terdahulu “*Service Community Collaboration: Peningkatan Minat Kunjungan Wisatawan Telaga Jonge Gunungkidul Melalui Digital Marketing*” oleh Yudas Tadius Andi Candra, dkk (2022) menunjukkan bahwa metode pemasaran yang digunakan masih minim dan tidak ada diversifikasi strategi promosi. Pokdarwis hanya memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk promosi, dengan konten yang disajikan secara sederhana (Candra,

Wulandari, Budiantara, & Airawaty, 2022). Akun resmi Telaga Jonge dengan nama pengguna *@pasartelagajonge* juga tidak menunjukkan dikelola secara baik ditunjukkan dengan tidak adanya konten yang rutin diunggah.

Gambar 1.3
Postingan Akun Instagram Telaga Jonge



Sumber: Tangkapan Layar Peneliti, 2024

Dari gambar tangkapan tersebut terlihat bahwa postingan terakhir diunggah pada 9 Juni 2023 tahun lalu. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada konsistensi promosi melalui media sosial Instagram.

Meskipun Telaga Jonge mampu menarik banyak pengunjung, namun belum ada kontribusinya terhadap pendapatan asli desa dan strategi promosinya pun belum optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, pemanfaatan potensi wisata yang belum maksimal, serta keterlibatan masyarakat yang masih terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan

inovasi dalam promosi. Dengan demikian, prinsip-prinsip *collaborative governance* dapat diterapkan lebih optimal untuk memaksimalkan potensi wisata Telaga Jonge.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pemerintahan yang ada di daerahnya dengan cara memperoleh desentralisasi yang merupakan pelimpahan urusan dari pemerintah pusat sesuai dengan otonomi daerahnya. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah, salah satunya mengelola pariwisata. Pemerintah daerah juga berwenang untuk mengatur sistem kepariwisataan melalui formulasi dan pelaksanaan kebijakannya sehingga dapat berdampak positif untuk daerahnya.

Telaga Jonge merupakan sumber daya bersama yang melibatkan banyak pihak dalam pengelolaannya, mulai dari pemerintah desa, masyarakat setempat, hingga pelaku usaha wisata. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks dan menjadi lahan subur untuk mempelajari bagaimana berbagai pihak berinteraksi dan mengambil keputusan bersama. Keberadaan sumber daya yang menarik seperti Telaga Jonge seringkali memicu konflik kepentingan antara berbagai pihak.

Telaga Jonge sudah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Namun, keberadaan Pokdarwis ini justru menimbulkan konflik. Seperti penelitian terdahulu oleh Agustinus Sakro (2020) “Sumber Daya Bersama, Kontestasi, Hadirnya Spirit Berdesa: Studi Kasus Pengelolaan Telaga Jonge Desa Pacarejo, Kabupaten Gunungkidul” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada peristiwa konflik di Telaga Jonge akibat dari upaya privatisasi yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mendapatkan kuasa melalui program desa wisata. Konflik ini dipicu oleh absennya desa dalam pengelolaan telaga, yang seharusnya menjadi sumber daya bersama (*common pool resources*) yang dikelola oleh komunitas lokal.

Konflik yang terjadi di Telaga Jonge, Desa Pacarejo, disebabkan oleh privatisasi pengelolaan wisata oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis mengambil alih pengelolaan Telaga Jonge tanpa melibatkan pemerintah desa yang menyebabkan ketidakhadiran peran desa dalam pengelolaan sumber daya bersama. Akibatnya, terjadi sengketa antara pemerintah desa dan Pokdarwis karena Pokdarwis menjalankan praktik eksklusif yang mengabaikan hak dan akses masyarakat terhadap Telaga Jonge.

Dari penjelasan di atas penulis melakukan wawancara prapenelitian kepada pihak masyarakat setempat dan beliau mengatakan adanya Pokdarwis dan tidak keikutsertaan pihak Pemdes secara aktif dalam mengelola objek wisata ini menjadikan permasalahan dalam ketidaksepemahaman dan juga pendapatan, yang dimana harusnya pemasukan dana dari wisata dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa. Sedangkan Pokdarwis menggunakan potensi desa

tetapi tidak melibatkan pihak pemerintahan desa dalam pengelolaan ini. Hal tersebut terjadi karena Telaga Jonge yang potensial untuk dikelola lebih lanjut, masuk ke dalam Program Desa Wisata bersama dengan Goa Jomblang dan Kalisuci. Sehingga Dinas Pariwisata memberi bantuan dana dan sumber daya lainnya langsung kepada Pokdarwis Jonge Raya, tidak melalui Pemerintah Desa Pacarejo terlebih dahulu. Oleh karena itu, Pokdarwis otonom tetapi Pemdes tetap merasa bahwa Telaga Jonge adalah sumber daya desa, sehingga masuk ke dalam wewenang Pemdes sesuai UU untuk memanfaatkan dan Pokdarwis sebatas pengelola. Hal tersebut kemudian menjadikan konflik antara Pemdes dengan masyarakat. Dengan permasalahan yang terjadi peneliti memiliki tujuan untuk membangun kembali *collaborative governance* dalam meningkatkan pengelolaan Wisata Telaga Jonge dan menjadikan *good governance* dalam pengelolaan wisata desa.

Berdasarkan penelitian terkait *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci oleh Falda Wisnu (2023) menjelaskan konsep *collaborative governance* dianggap sebagai alternatif yang dinilai dapat mendorong dan melaksanakan pembangunan kawasan pariwisata. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh R. Slamet Santoso dan Titik Djumiarti (2020) di Kawasan Lindung Sangiran juga menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai model berharga untuk mendorong kerja sama dan mencapai hasil yang sukses dalam kebijakan publik dan manajemen publik.

Menurut Ansell dan Gash, 2007: 543 (dalam Arrozaaq, 2016), *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif merupakan suatu model baru strategi

pemerintah yang memungkinkan beragam *stakeholders* untuk bekerja sama dalam sebuah forum untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, menurut Balogh 2011: 2 (dalam Febrian, 2016), *collaborative governance* menjadi suatu struktur dan proses untuk mengelola dan merumuskan keputusan kebijakan publik dengan partisipasi konstruktif para aktor di berbagai tingkatan, baik di tingkat pemerintah dan/atau lembaga publik, masyarakat sipil, dan swasta.

Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap bersama, pemahaman bersama dan hasil sementara merupakan tahapan proses dalam *collaborative governance*. Dalam proses ini yang dilakukan peneliti ialah melihat proses dialog tatap muka antar sumber informan terkait dengan pengelolaan wisata. Kemudian, membangun kepercayaan dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mengetahui bagaimana membangun kepercayaan dalam membentuk proses *collaborative governance*. Proses komitmen terhadap bersama ini peneliti ingin mengetahui seberapa besar komitmen antara pihak pemerintah dengan kelompok dalam mengelola wisata. Yang terakhir hasil sementara, dalam proses ini melihat keberhasilan dalam pengelolaan.

Dari uraian masalah di atas, Telaga Jonge dalam pengembangannya melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, sehingga menjadi contoh nyata dari kompleksitas hubungan sosial dalam pengelolaan sumber daya. Proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan Telaga Jonge melibatkan berbagai pihak, sehingga dapat menjadi studi kasus yang menarik untuk menganalisis bagaimana mekanisme *collaborative governance* bekerja dalam praktik. Maka dari itu, dilakukan penelitian dengan judul “Proses *Collaborative*

Governance dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Jonge Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul”.

Identifikasi Masalah:

- 1) Telaga Jonge merupakan wisata yang terkenal di Gunungkidul dan memiliki keunikan tersendiri sebagai objek wisata. Potensi wisata ini menarik minat berbagai pihak untuk terlibat dalam pengembangannya. Tidak hanya bergantung pada potensi alamnya, tetapi juga pada kemampuan berbagai pihak untuk bekerja sama dalam pengelolaannya.
- 2) Telaga Jonge merupakan sumber daya bersama yang melibatkan banyak pihak dalam pengelolaannya, mulai dari pemerintah desa, masyarakat setempat, hingga pelaku usaha wisata. Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks dan memicu konflik kepentingan antar pihak.
- 3) Dalam pengelolaannya Telaga Jonge melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, yang merupakan contoh nyata dari kompleksitas hubungan sosial dalam kolaborasi pengelolaan sumber daya bersama.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu administrasi publik di bidang pengembangan objek wisata melalui *collaborative governance* serta sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut di masa berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Objek Wisata Telaga Jonge

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi, pemikiran, dan saran yang bermanfaat untuk pengembangan objek wisata melalui penerapan *collaborative governance* yang lebih efektif dan efisien.

- 2) Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan ilmu administrasi publik terutama *collaborative governance* untuk mengembangkan objek wisata yang berkelanjutan.

- 3) Bagi pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya atau perbandingan dengan objek wisata yang menghadapi permasalahan yang serupa.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai “Kolaborasi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Perkotaan di Kabupaten Lamongan” oleh Pranawa Adi Nurnathagotra, Raden Slamet Santoso, dan Hardi Warsono (2023) dengan metode penelitian kualitatif menjelaskan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Lamongan sudah menghasilkan hasil yang positif, tetapi masih belum optimal. Faktor penghambat utama terletak pada koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang masih minim dan terlaksana secara daring, sehingga menghambat pelaksanaan dan perencanaan (Nurnathagotra, Santoso, & Warsono, 2023). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash, hanya saja terdapat perbedaan fokus objek yang diteliti yaitu Ruang Terbuka Hijau dan objek wisata. Selain itu, penelitian tersebut mengidentifikasi faktor pendorong sesuai dengan kondisi di lapangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008).

Penelitian yang dilakukan Mohamad Sukarno dan Dyah Mutiarin (2023) dengan judul “*Branding tourism and collaborative governance: A case study from Nglanggeran village*” dengan metode kualitatif, menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan hingga 150.000 per tahun dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 1,9 miliar Rupiah.

Peningkatan ini berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, menciptakan peluang kerja baru, dan mendorong kemajuan sektor pertanian melalui budidaya durian dan buah longan dengan menggunakan sumber air buatan seperti Embung Nglanggeran (Sukarno & Mutiarin, 2023). Selain dampak ekonomi, perkembangan pariwisata ini juga berhasil merevitalisasi budaya lokal dan memperbaiki fasilitas serta infrastruktur desa. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Namun, terletak pada lokasi penelitian dan objek wisata yang dikaji, penelitian Mohamad Sukarno dan Dyah Mutiarin memfokuskan pada Nglanggeran *village* sementara penelitian yang akan dilakukan fokus di lokasi Telaga Jonge.

Penelitian yang dilakukan Sulastri, Rita Myrna, dan Neneng Weti (2022) dengan judul “Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang” dengan metode kualitatif menjelaskan kolaborasi dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik terbukti dengan terpenuhinya hampir semua faktor keberhasilan Mattessich dan Monsey (1992). Namun, dua faktor masih memerlukan perbaikan, yaitu komunikasi dan sumber daya kolaborasi (Sulastri, Myrna, & Isnawaty, 2022). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas mengenai *collaborative governance*. Perbedaannya terletak pada lokus penelitian dan juga adanya analisis mengenai proses *collaborative governance* pada penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian “Pengembangan Pariwisata Melalui *Collaborative Governance* di Kabupaten Magelang” (2022) oleh Mochamad Hanafi dengan metode kualitatif menunjukkan *collaborative governance* di Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh pemetaan *stakeholders*, peran *stakeholders*, regulasi, dan komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* (Hanafi, 2022). Penelitian ini menyoroti peran kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, dan institusi dalam keberhasilannya. Hal ini juga mengkaji pengaruh peraturan, pemetaan pemangku kepentingan, dan komunikasi terhadap efektivitas tata kelola kolaboratif di sektor pariwisata. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji mengenai *collaborative governance* tetapi terdapat perbedaan lokus dan juga kajian dalam *collaborative governance*, yang dimana penelitian yang akan dilakukan berfokus pada proses dan juga faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008),

Penelitian Fitri Aulia, Herijanto Beki, dan Elisa Susanti (2021) dengan metode kualitatif yang berjudul “Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata di Desa Wisata Kubu Gadang” menemukan bahwa kolaborasi telah berhasil dalam banyak aspek, tetapi terdapat tantangan terkait dengan kurangnya pendanaan dan kurangnya anggota yang terampil (Aulia, Beki, & Susanti, 2021). Penelitian ini berfokus pada aspek kolaborasi pengembangan pariwisata dan menganalisis enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi Paul W. Mattessich dan Barbara R. Monsey. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas mengenai *collaborative governance*. Tetapi terdapat

perbedaan pada lokusnya, serta tambahan analisis proses *collaborative governance* dalam penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu berjudul “*Collaborative Governance in Desertification Control in China: A Case Study of Hobq Desert*” dengan metode kualitatif oleh Wensheng He dan Xiao Yue (2023) *collaborative governance* sangat penting untuk pengendalian penggurunan yang efektif. Hal ini menyoroti perlunya kolaborasi kelembagaan, pembentukan sistem tata kelola kolaboratif, dan keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, pasar, dan masyarakat (He & Yue, 2023). Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi dan berbagi informasi, teknologi, dan pengetahuan antar *stakeholders*. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya mekanisme partisipasi dan evaluasi kinerja dalam *collaborative governance*. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif sangat penting untuk mengatasi masalah kompleks pengendalian penggurunan. Penelitian ini berfokus pada isu lingkungan dan penggurunan, sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengembangan pariwisata. Persamaannya tertelak pada keterlibatan berbagai pihak, sinergi, dan berbagi informasi sebagai kunci sukses dalam tata kelola kolaboratif.

Penelitian “*Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community Oriented Destination*” dengan metode kualitatif oleh Bernhard Fabian Bichler, dan Magdalena Lösch (2019) memaparkan hasil pelaksanaan *collaborative governance* di destinasi pariwisata memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menyoroti tentang pentingnya membangun hubungan kepercayaan dan saling menghormati serta adanya komunikasi dan keterlibatan

keberlanjutan dengan *stakeholders* (Bichler & Lösch, 2019). Di samping itu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam penelitian ini, yaitu transformasi kelembagaan karena perubahan dalam pengaturan tata kelola menyebabkan ketidakamanan dan hilangnya kepercayaan di antara *stakeholders*. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar *stakeholders* untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perbedaannya terletak pada konteks dan objek penelitian yang berbeda, di mana penelitian tentang Telaga Jonge akan lebih menitikberatkan pada pengembangan objek wisata sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengendalian penggurunan di China.

Penelitian terdahulu “*Service Community Collaboration: Peningkatan Minat Kunjungan Wisatawan Telaga Jonge Gunung Kidul Melalui Digital Marketing*” oleh Yudas Tadius Andi Candra, dkk (2022) menunjukkan bahwa Pelatihan yang dipimpin oleh Tim Pengabdian UMBY berkolaborasi dengan Tim Pengabdian UPSI Malaysia dan berjalannya sangat lancar (Candra, Wulandari, Budiantara, & Airawaty, 2022). Antusiasme peserta pelatihan dalam mengikuti kegiatan ini menjadi buktinya. Terdapat komunikasi dua arah yang terjalin melalui diskusi antara narasumber dan peserta. Penelitian ini menitikberatkan pada peningkatan minat kunjungan wisatawan melalui digital marketing dan kolaborasi antara Tim Pengabdian UMBY dan Tim Pengabdian UPSI Malaysia. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan fokus pada kolaborasi antar berbagai pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata tersebut. Persamaannya adalah keduanya menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antar *stakeholders*

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, meskipun dengan pendekatan dan konteks penelitian yang berbeda.

Penelitian “Ekowisata Telaga Jonge Pacarejo Semanu Gunungkidul” tahun 2023 oleh Annisa Desy Nur Romadhoni dan Aditha Agung Prakoso menunjukkan hasil penguatan pengembangan Telaga Jonge berbasis ekowisata ini dilakukan pada 5 aspek, antara lain aspek konservasi, komunitas, ekonomi, edukasi, dan interpretasi (Romadhoni & Prakoso, 2023). Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak terkait. Baik dalam penelitian ekowisata maupun *collaborative governance*, kolaborasi dianggap kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan objek wisata. Perbedaan utamanya mungkin terletak pada fokus penelitian. Penelitian ekowisata lebih menitikberatkan pada aspek-aspek spesifik seperti konservasi lingkungan, pemberdayaan komunitas lokal, aspek ekonomi, edukasi, dan interpretasi dalam pengembangan Telaga Jonge. Sementara penelitian tentang *collaborative governance* akan lebih fokus pada proses kolaborasi antar *stakeholders* dan tata kelola yang efektif dalam pengembangan objek wisata tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Agustinus Sakro (2020) “Sumber Daya Bersama, Kontestasi, Hadirnya Spirit Berdesa: Studi Kasus Pengelolaan Telaga Jonge Desa Pacarejo, Kabupaten Gunungkidul” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada peristiwa konflik di Telaga Jonge akibat dari upaya privatisasi yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mendapatkan kuasa melalui

program desa wisata. Konflik ini dipicu oleh absennya negara dan desa dalam pengelolaan telaga, yang seharusnya menjadi sumber daya bersama (*common pool resources*) yang dikelola oleh komunitas lokal (Sakro, 2020). Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya menyoroti pentingnya kolaborasi dan tata kelola yang efektif dalam pengelolaan objek wisata. Baik dalam konteks konflik akibat privatisasi maupun dalam konteks *collaborative governance*, kolaborasi antar pihak terkait dianggap penting untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan berdaya. Perbedaan utamanya terletak pada penelitian ini lebih menyoroti konflik dan permasalahan yang terjadi akibat privatisasi sumber daya Telaga Jonge, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada proses kolaborasi antar *stakeholders* dan tata kelola yang efektif dalam pengembangan objek wisata tersebut.

1.5.2 Administrasi Publik

Istilah administrasi mencakup berbagai aspek, seperti arahan, pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pengarahan, serta pengembangan prinsip-prinsip untuk implementasi kebijakan publik. Selain itu, administrasi juga melibatkan analisis, penyeimbangan, dan penyajian keputusan serta pertimbangan kebijakan. Ini merupakan pekerjaan baik secara individu maupun kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, serta berfungsi sebagai arena dalam bidang akademik dan teoritik. menurut A. Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991:9) (Keban, 2019). Sedangkan Trecker (Donovon & A., 1991) berpendapat bahwa administrasi adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan orang dan sumber daya secara bersama-

sama melalui kerja sama. Donovan dan Jackson juga menjelaskan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan secara eksplisit termasuk ke dalam definisi tersebut.

Sementara itu, administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik (Chandler & J., 1988). Menurut Chandler dan Plano (1988) Administrasi publik juga dapat dianggap sebagai seni dan ilmu dalam mengelola urusan publik serta melaksanakan berbagai tugas yang telah ditentukan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik melalui perbaikan dan penyempurnaan, terutama dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Terdapat berbagai variasi persepsi mengenai administrasi publik. Menurut Yerimias T. Keban (2019) dalam bukunya, variasi makna dari administrasi publik dapat dilihat dari persepsi mengenai kata “administrasi publik” itu sendiri. Ada yang menerjemahkan sebagai *administration of public*, *administration for public*, ataupun *administration by public*. Istilah "*administration of public*" atau administrasi publik menggambarkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai agen tunggal yang memiliki kekuasaan atau sebagai regulator dalam mengatur dan mengambil langkah-langkah yang dianggap penting untuk masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus mengikuti aturan pemerintah. Selanjutnya, istilah "*administration for public*" menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam menjalankan misi pelayanan

publik. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih memahami cara terbaik untuk memberikan layanan, meskipun tidak berupaya memberdayakan publik. Di sisi lain, istilah "*administration by public*" mengacu pada konsep yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan penekanan pada kemandirian dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah berusaha untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat mengatur kehidupannya tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah. Akibatnya, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif mulai dari penentuan kebutuhan hingga pelaksanaan dan evaluasi hasil, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dan dapat lebih fokus pada urusan strategis negara. Variasi dalam pemahaman administrasi publik ini mencerminkan rentang perkembangan administrasi publik, mulai dari yang paling tidak demokratis hingga yang paling demokratis, serta dari yang kurang memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat hingga yang benar-benar mengedepankan pemberdayaan tersebut.

Ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks dan dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan serta dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Menurut Chandler dan Plano (1988), semakin kompleks permasalahan dalam kehidupan manusia, semakin rumit pula tugas yang dilakukan oleh pemerintah atau administrasi publik.

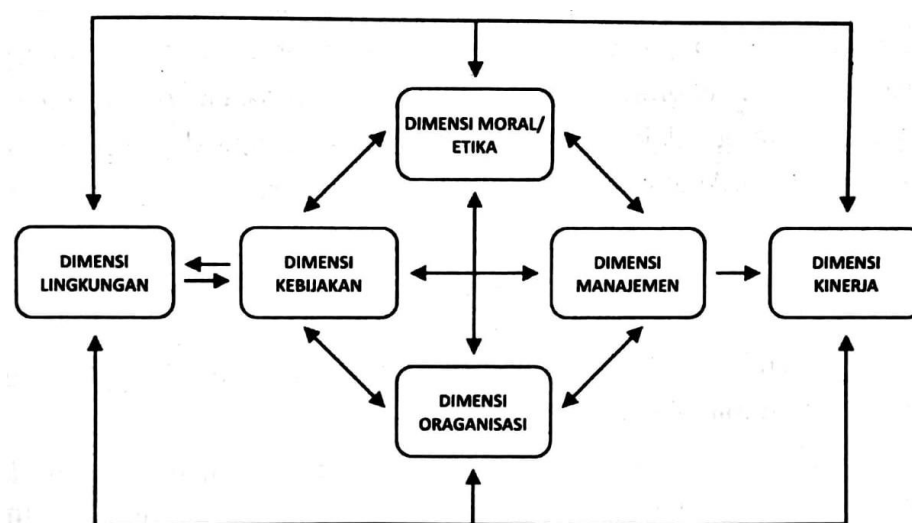
Unsur-unsur utama dalam administrasi publik atau dinamika administrasi publik meliputi:

- (1) Manajemen aspek internal dan eksternal.

- (2) Menata struktur organisasi sehingga kewenangan, tanggung jawab, dan perilaku sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan.
- (3) Merespons kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat dengan mengambil keputusan atau kebijakan publik yang tepat.
- (4) Mengatur moral dan etika melalui penerapan kode etik untuk memastikan kemampuan, kompetensi, dan profesi digunakan semata-mata untuk kepentingan umum.
- (5) Memahami karakteristik lingkungan administrasi publik, termasuk hubungan antara lembaga negara, sektor swasta, masyarakat, serta dimensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
- (6) Memenuhi akuntabilitas kinerja sebagai komitmen kepada masyarakat yang diwujudkan melalui pelayanan publik atau penyediaan barang yang dapat dipertanggungjawabkan (Keban, 2019).

Gambar 1.4

Hubungan Antar Dimensi Strategis Administrasi Publik



Sumber: Buku Enam Dimensi Strategis Adiminstrasi Publik

Kegiatan administrasi publik secara khusus berfokus pada aspek manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Ini menunjukkan bahwa administrasi publik lebih terkait dengan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik (Keban, 2019).

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Berdasarkan fokus dan lokus disiplin ilmu, Henry dalam Yermias (2029) mengungkapkan Dalam administrasi publik, telah terjadi lima paradigma. Paradigma pertama (1900-1926) dikenal sebagai “Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi.” Dalam bukunya "Politics and Administration" (1900), Goodnow menjelaskan bahwa politik harus fokus pada kebijakan, sementara administrasi berfokus pada implementasi kebijakan tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi tercermin dalam pemisahan antara badan legislatif dan badan eksekutif, dengan badan yudikatif berperan membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma ini adalah bahwa administrasi dipandang sebagai sesuatu yang netral dan ditujukan untuk mencapai efisiensi serta ekonomi dalam birokrasi pemerintahan.

Paradigma 2 (1927-1937) “Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi” tokoh-Tokoh klasik seperti Fayol dan Taylor sangat mempengaruhi paradigma ini. Fokus administrasi publik di sini adalah prinsip-prinsip administrasi yang dituangkan dalam bentuk POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang dapat diterapkan secara universal. Sementara itu, lokusnya tidak dijelaskan secara rinci karena dianggap bahwa

prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimana saja, termasuk dalam organisasi pemerintah.

Paradigma 3 (1950-1970) “Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik” John Gaus menyatakan bahwa teori administrasi publik sejatinya juga merupakan teori politik, sehingga muncul paradigma baru yang memandang administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik. Dalam konteks ini, birokrasi pemerintahan menjadi lokusnya, sementara fokusnya menjadi tidak jelas karena banyaknya kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi publik. Pada periode ini, administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap sebagai disiplin yang sangat dominan dalam bidang administrasi publik.

Paradigma 4 (1956-1970) “Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi” Dalam paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya populer dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini meliputi perilaku organisasi, analisis manajemen, serta penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasi. Terdapat dua arah perkembangan dalam paradigma ini: satu berorientasi pada pengembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang lainnya berorientasi pada kebijakan publik. Lokus dalam paradigma ini tidak jelas karena fokus yang dikembangkan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam administrasi publik.

Paradigma 5 (1970-sekarang) “Paradigma Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik” dalam paradigma ini, administrasi publik memiliki fokus dan

lokus yang jelas. Fokus utamanya meliputi teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sementara lokusnya berkaitan dengan masalah-masalah serta kepentingan publik.

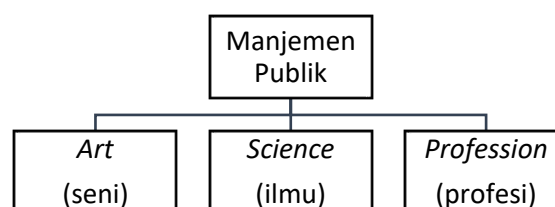
Paradigma 6 (1990-sekarang) dikenal dengan paradigma *Governance*. Paradigma ini memiliki tiga aktor dalam pelaksanaannya, yaitu *civil society*, *government*, dan *private sector* yang memiliki peran dalam pembangunan. Kerja sama, meminimalisir peran, dan mendelegasikan kepada aktor lain menjadi landasan dalam paradigma ini. *Collaborative governance* memungkinkan berbagai pemangku kepentingan berkumpul dalam suatu forum untuk mencapai kesepakatan, menurut Ansell dan Gash (2007: 543).

1.5.4 Manajemen Publik

Gambaran tentang manajemen publik menurut Laurence Lynn (1996) yang dikutip dari Wijaya dan Danar (2014) yaitu sebagai seni (*art*), ilmu (*science*), dan profesi (*proffession*).

Gambar 1.5

Manajemen Publik sebagai Art, Science, dan Profession



Sumber: Buku Manajemen Publik UB Press

Manajemen publik sebagai seni merupakan aktivitas kreatif yang dilakukan oleh para praktisi dan tidak dapat dipelajari dengan pendekatan yang bersifat

'kuantitatif'. Ini berarti bahwa manajemen publik memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh situasi serta kondisi di mana ia beroperasi.

Manajemen publik sebagai ilmu berarti bahwa bidang ini memerlukan analisis yang sistematis melalui interpretasi dan penjelasan. Sementara itu, manajemen publik sebagai profesi merujuk pada sekelompok individu yang mendedikasikan diri mereka untuk disiplin ini.

Ghofur (2014) mengatakan bahwa manajemen publik ialah manajemen pemerintah. Hal ini berarti manajemen publik juga memiliki maksud untuk mengatur, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengontrol terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

G.R Terry yang dikutip oleh Dyah Hariani (2013) menyatakan terdapat empat fungsi yaitu *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC), yaitu:

1) Perencanaan (*planning*)

G.R Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) menyatakan bahwa *planning* adalah proses memilih dan menghubungkan pembuatan, fakta-fakta, dan penggunaan perkiraan untuk masa mendatang dengan merumuskan dan menggambarkan tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan tujuan yang sudah ditetapkan.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Organizing adalah menentukan, mengelompokkan, dan menyusun macam-macam jenis kegiatan dan tugas yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan, menyediakan faktor-faktor fisik untuk kebutuhan kerja, menempatkan

pegawai, menunjukkan hubungan wewenang yang diberikan kepada setiap orang dalam setiap tugas kegiatan. Prinsip-prinsip organizing yaitu tujuan (*the objective*), penempatan tenaga kerja (*assign the personnel*), pelimpahan wewenang (*delegation of authority*), wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*), pembagian kerja (*departementation*).

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Actuating adalah upaya menegakkan dan memastikan seluruh anggota agar berkemauan dan berusaha sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Faktor yang menentukan *actuating* yaitu sikap dan moral, dorongan, kedisiplinan, kepemimpinan, komunikasi, pengawasan, pengawasan.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan sebagai proses dalam menentukan indikator-indikator yang harus dicapai (standar atau ukuran) saat pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, dan perbaikan. Menurut G.R. Terry, proses *controlling* yaitu:

1. Pengukuran kinerja/performa
2. Perbaikan penyimpangan dengan tindakan yang tepat
3. Menentukan dasar atau standar dalam *controlling*
4. Perbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat (Sukarna, 2011: 10).

1.5.5 *Collaborative Governance*

1.5.5.1 Definisi *Collaborative Governance*

Konsep *collaborative governance* muncul sebagai pendekatan mendasar dalam mengatasi tantangan-tantangan sosial yang kompleks dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif ke dalam praktik

manajemen publik. Dalam konsep ini, pemerintah ikut melibatkan sektor privat dan masyarakat untuk bersama menangani urusan publik dengan menekankan pada inklusivitas dan pengambilan keputusan bersama. Kolaborasi merupakan suatu kegiatan yang secara mendasar berada dalam pengelolaan jaringan sosial berupa hubungan antar simpul komunikasi seluruh *stakeholders*. Kolaborasi dalam *collaborative governance* sebagai suatu proses pengelolaan organisasi yang melibatkan sejumlah organisasi pemerintah dan non-pemerintah dengan model yang berbeda-beda, bisa hanya melibatkan lembaga swadaya masyarakat lokal saja, organisasi privat saja, atau dapat juga lembaga yang sudah teafiliasi dengan pemerintah (Fadlurrahman, Kurniasih, & Winanta, 2022).

Oleh karena itu, *collaborative governance* memerlukan partisipasi seluruh *stakeholders* dalam dialog untuk mengungkapkan kepentingannya masing-masing (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020). Pada akhirnya, *collaborative governance* menawarkan jalur yang menjanjikan menuju manajemen publik yang lebih efektif, adil, dan responsive sehingga telah diterapkan di berbagai bidang, termasuk perencanaan kota dan wilayah, administrasi publik dan hukum, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup, dan pariwisata. Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai serangkaian pengaturan yang menghubungkan dan melibatkan pemangku kepentingan dengan organisasi publik dalam suatu ruang bersama, yang memungkinkan partisipasi dan pengambilan keputusan bersama. Dalam *collaborative governance*, *stakeholders* yang terlibat mencakup masyarakat, swasta, dan pemerintah. Mereka terlibat menghasilkan keputusan, kesepakatan, dan mencapai konsensus bersama melalui interaksi formal

dan informal sesuai dengan standar, norma, dan peraturan yang menguntungkan satu sama lain. Burgess menyatakan bahwa memungkinkan untuk menarik keterlibatan lebih banyak pihak dalam perumusan solusi atas permasalahan publik sehingga menghasilkan kebijakan publik secara bersama melalui proses musyawarah dengan menggabungkan berbagai perspektif sosial (Astuti et al., 2020). *Collaborative governance* dipandang sebagai paradigma yang menekankan kepemilikan bersama dan pemahaman peran antar *stakeholders* untuk mengatasi berbagai permasalahan.

Menurut Ansell dan Gash yang dikutip dari (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020) *collaborative governance* adalah pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara. Pendekatan ini berfokus pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik serta program publik. (Ansell dan Gash, 2008).

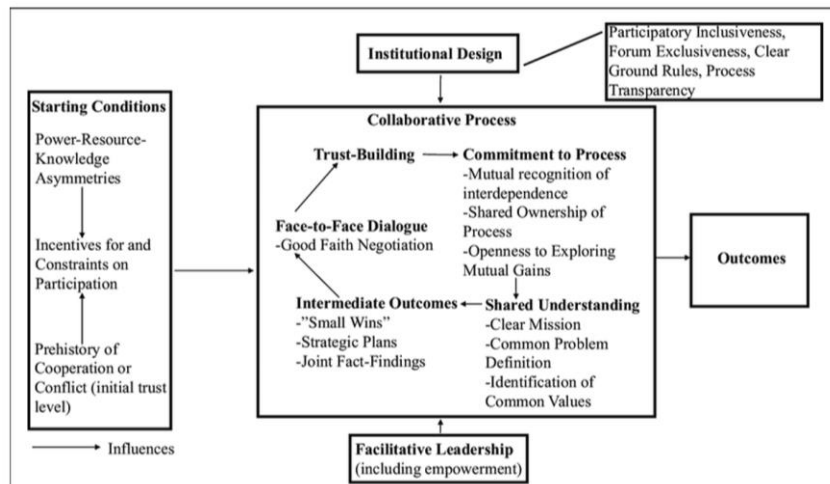
Menurut O'Leary dan Bingham (dalam Sudarmo, 2015) kolaborasi adalah konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai organisasi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat atau sulit diatasi oleh satu organisasi saja. Pendapat ini diperkuat Bardach (Sudarmo, 2015), yang mendefinisikan kolaborasi sebagai aktivitas bersama antara dua institusi atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan "*public value*" dibandingkan dengan beroperasi secara terpisah.

Edward DeSeve (Sudarmo, 2015) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sistem terintegrasi yang mengelola hubungan melintasi batas organisasi formal dan informal, dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi serta definisi kesuksesan yang jelas. Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011) menambahkan bahwa *collaborative governance* tidak hanya melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah dan non-pemerintah, tetapi juga mencakup "*multi partner governance*" yang melibatkan sektor swasta, masyarakat, dan komunitas sipil. Ini dibangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat "*hybrid*", seperti kerja sama publik-privat-sosial. Selanjutnya, Balogh dkk (Subarsono, 2011) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses dan struktur dalam manajemen serta perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai level secara konstruktif, baik dari pemerintahan maupun instansi publik, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja.

1.5.5.2 Model Collaborative Governance

Ansell dan Gash dalam jurnalnya "*Collaboration Governance in Theory and Practice*" merumuskan model *collaborative governance* berdasarkan kajian literatur.

Gambar 1.6
Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash



Sumber: Anshel dan Gash, 2008

Dari gambar tersebut, terdapat empat variabel utama dari model *collaborative governance*, yaitu:

1) Kondisi awal

Kondisi awal berperan penting sebelum proses kolaborasi dimulai. Ada situasi yang dapat mendukung atau menghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, serta antara lembaga/organisasi dan pemangku kepentingan. Terdapat tiga variabel utama pada kondisi awal ini, yaitu: ketidakseimbangan dalam hal pengaruh/kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah masa lalu, baik berupa kerja sama sebelumnya maupun konflik yang pernah terjadi di antara pemangku kepentingan; serta bentuk dorongan dan hambatan berpartisipasi dalam kolaborasi.

2) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar dalam berkolaborasi, yang penting untuk memberikan legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Desain ini menekankan aturan partisipasi dalam kolaborasi, pembentukan forum, aturan pelaksanaan yang jelas, serta transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3) Kepemimpinan

Dalam kolaborasi, sering kali muncul konflik atau perselisihan yang tinggi serta ketidakpercayaan yang besar di antara pemangku kepentingan. Namun, di sisi lain, biasanya ada keinginan kuat dari para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang diterima dan dipercaya oleh pemangku kepentingan serta dapat diandalkan sebagai mediator dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat, yang dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan, penting untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan kolaborasi. Kepemimpinan seperti ini biasanya muncul dari komunitas pemangku kepentingan itu sendiri.

4) Proses kolaboratif

Menentukan titik awal dari proses kolaborasi sangat sulit. Terdapat lima tahapan dalam proses kolaborasi.

1.5.5.3 Proses *Collaborative Governance*

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka menjadi proses inti dalam upaya membangun pemahaman, kepercayaan, dan komitmen bersama dalam proses kolaborasi.

Hal ini disebabkan dialog tatap muka merujuk pada komunikasi langsung antara pemangku kepentingan dalam ruang kolaboratif, yang menjadi dasar untuk membangun kepercayaan yang baik. Menurut Ansell dan Gash (2008), dialog tatap muka sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk menemukan peluang yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai isu-isu yang dihadapi..

2. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan mencakup pengembangan rasa saling pengertian, penghormatan, dan keyakinan, serta melibatkan dialog antara para pemangku kepentingan. Ansell dan Gash (2008) berpendapat bahwa proses ini bersifat dinamis dan memerlukan perhatian, komitmen, serta upaya yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat.

3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses merujuk pada pengembangan keyakinan dan penguatan kepercayaan antara para pemangku kepentingan, sehingga tercipta keadaan saling ketergantungan yang mendorong keterlibatan dalam proses kolaboratif. Hal ini mencakup keterbukaan terhadap pengembangan bersama, pemahaman mengenai ketergantungan satu sama lain, dan rasa kepemilikan terhadap proses yang dijalani bersama.

4. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama adalah proses yang berkaitan dengan pengembangan persepsi atau pemahaman yang sama mengenai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup nilai-nilai kolaborasi, tujuan kolaboratif,

serta identifikasi masalah yang dihadapi, yang memerlukan upaya dan perhatian berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.

5. Hasil Sementara

Hasil sementara merujuk pada keluaran atau hasil kecil yang muncul selama proses kolaboratif, yang dapat dirasakan secara nyata dan berdampak pada keberlanjutan kerja sama. Proses ini dapat mencakup fakta bersama, rencana strategis, dan hasil nyata lainnya. Pentingnya hasil sementara ini adalah untuk mendorong kepercayaan, keterlibatan, dan komitmen di antara pemangku kepentingan, serta memberikan bukti kemajuan menuju tujuan kolaborasi.

1.5.5.4 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses *Collaborative Governance*

Ansell dan Gash (2008) menguraikan beberapa variabel yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi proses *collaborative governance*, yaitu:

1. Kondisi Awal

Kondisi awal adalah tahap awal dalam membentuk hubungan, di mana aktor-aktor dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda memutuskan untuk bekerja sama dan berkolaborasi guna mencapai visi dan tujuan bersama. Tahapan ini terdiri dari tiga aspek yaitu ketimpangan kekuasaan atau pengaruh stakeholder, pengetahuan, sumber daya, sejarah terkait kerjasama atau konflik antar stakeholder, dorongan dan hambatan dalam kolaborasi.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif menjadi elemen utama dalam collaborative governance, yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengarahkan para pemangku kepentingan ke dalam forum untuk mencapai konsensus mengenai kejelasan peraturan, membangun kepercayaan, berbagi keuntungan bersama, dan memberdayakan mereka.

3. Desain Institusional

Desain institusional mencakup kerangka peraturan yang ada dalam kolaborasi dan telah disetujui oleh semua aktor yang terlibat. Keberhasilan kolaborasi akan tercapai apabila seluruh aktor merasakan dampaknya dan memperhatikan isu yang ada. Hal ini juga berkaitan dengan transparansi, di mana para pemangku kepentingan memiliki keyakinan bahwa proses tersebut setara, menyeluruh, dan transparan.

1.5.6 Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata didefinisikan sebagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai jenis aktivitas, layanan, dan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran wisata.

Menurut Fandeli (dalam Satrio Utama, 2018), daya tarik pariwisata dapat dibagi menjadi 3, yakni daya tarik budaya, daya tarik alam, dan daya tarik minat khusus.

1. Daya Tarik Wisata Budaya adalah aktivitas wisata dengan melibatkan kunjungan ke tempat-tempat unik atau memiliki ciri khas budaya tertentu yang

merupakan hasil kreativitas, cipta rasa, dan karsa manusia, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Contohnya meliputi kesenian reog, kesenian gamelan, dan lain-lain.

2. Daya Tarik Wisata Alam, aktivitas mengeksplorasi tempat-tempat yang menawarkan keindahan alam yang unik, baik dalam hal lingkungan maupun keanekaragaman alamnya. Ini bisa berupa perjalanan ke danau, hutan, sungai, padang pasir, goa, atau pantai.
3. Daya Tarik Wisata Khusus, aktivitas wisata dengan melakukan kunjungan ke tempat yang sesuai dengan minat kegiatan karena merupakan kreasi artifisial manusia. Contohnya, wisata olahraga dan wisata hiburan.

1.5.7 Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan objek wisata merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik wisata, sehingga jumlah wisatawan dapat meningkat. Dengan demikian, baik masyarakat setempat maupun pemerintah akan merasakan dampak positif dari peningkatan tersebut (Paturusi, 2021). Sedangkan Mario (2015) menjelaskan bahwa Pengembangan pariwisata adalah upaya untuk meningkatkan dan memajukan objek wisata agar menjadi lebih baik dan lebih menarik, baik dari segi lokasi maupun elemen-elemen yang ada di dalamnya.

Soetomo (2001) menyatakan bahwa ada beberapa hal penting dalam pengembangan pariwisata diantaranya:

- a) Atraksi, merupakan pertunjukan khusus yang diselenggarakan untuk menarik perhatian para wisatawan.
- b) Aktivitas, kegiatan yang berkaitan dengan dinamika kehidupan kawasan, memberikan kesenangan.
- c) Aksesibilitas, fasilitas yang memudahkan wisatawan untuk mengunjungi lokasi tujuan wisata, termasuk transportasi dan jalan menuju tempat tersebut.
- d) Amenitas, penunjang fisik yang disediakan oleh penyelenggara wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung.

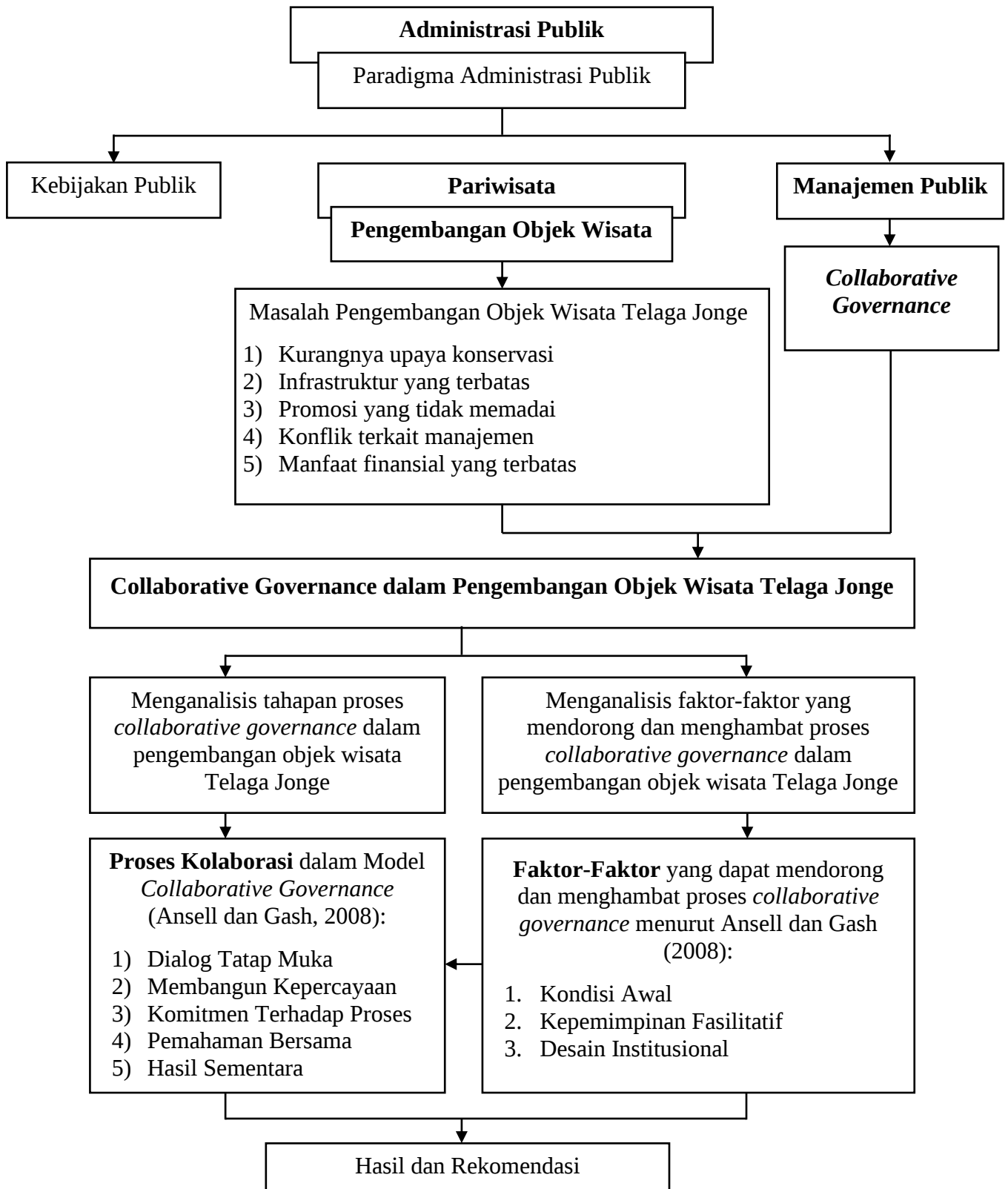
Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengembangan objek wisata secara berkelanjutan menurut Arida (2016) adalah

1. Mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan komunitas (pemerintah daerah, industri pariwisata, dan organisasi) dan pengunjung dengan saling bekerja.
2. Memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah lokal (UMKM) untuk memulai usahanya sendiri disertai dengan program pendidikan yang berhubungan dengan pariwisata.
3. Mengajak masyarakat lokal dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab akan alam dan budaya terhadap keberlanjutan pariwisata.
4. Melibatkan berbagai banyak pihak agar memiliki input yang lebih baik dan menghasilkan output yang maksimal.
5. Membangun hubungan kerja sama yang menguntungkan antara operator penjual paket wisata dengan masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan.

6. Memberikan keuntungan dan menjamin keberlanjutan dan tidak berdampak negatif pada generasi berikutnya.
7. Terdapat transparansi terhadap penggunaan sumber daya agar tidak disalahgunakan.
8. Mewujudkan tiga kualitas hidup masyarakat lokal, kualitas berusaha kepada para pengusaha, dan kualitas pengalaman wisatawan.
9. Membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat, baik usaha baru maupun yang sudah berkembang.
10. Memperhatikan peraturan, perjanjian, dan kebijakan tingkat lokal, nasional, ataupun internasional sehingga kedepannya pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan optimal.
11. Mengedepankan prinsip optimalisasi, bukan eksploitasi.
12. Adanya pemantauan dan evaluasi berkala untuk menjamin keberlanjutan dan sesuai dengan seluruh kapasitas yang tersedia.
13. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan untuk bidang keahlian pariwisata.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan pengembangan objek wisata secara terpadu menurut Sutiarso (2018) untuk memelihara dan memperkenalkan kebudayaan di objek wisata tersebut seperti: kemudahan imigrasi/birokrasi, akomodasi yang terjangkau, promosi objek wisata, pemandu wisata yang terampil, transportasi yang mudah dan lancar, kondisi lingkungan bersih dan sehat, penawaran barang dan jasa dengan kualitas baik;, atraksi yang menyenangkan.

1.5.8 Kerangka Pemikiran



1.6 Operasionalisasi Konsep

Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge. Berdasarkan pada teori penelitian fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis proses *collaborative governance*

Analisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge

- 1) Dialog Tatap Muka: Ruang komunikasi antar *stakeholders* untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan komitmen bersama dalam proses kolaborasi serta membahas perencanaan dan alokasi sumber daya.
- 2) Membangun Kepercayaan. Proses dinamis dalam mengembangkan rasa saling percaya sehingga antar *stakeholders* dapat saling terbuka dalam proses kolaborasi dengan memperhatikan waktu yang tepat dalam menumbuhkan kepercayaan secara efektif.
- 3) Komitmen Terhadap Proses yang mengacu pada rasa saling memiliki agar tetap terlibat serta kesediaan dalam melaksanakan tanggung jawab dalam proses kolaborasi sesuai kesepakatan agar dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.
- 4) Pemahaman Bersama. Pembentukan dan pengembangan pemahaman persepsi bersama akan nilai-nilai kolaborasi dan tujuan yang telah ditetapkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman.

- 5) Hasil Sementara. Keluaran atau hasil yang muncul selama proses kolaboratif dapat dirasakan secara nyata dan memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan kerja sama, termasuk rencana strategis, fakta, ataupun umpan balik terhadap keluaran tersebut.

2. Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge

1) Kondisi Awal

Adanya pembentukan relasi yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan swasta terkait *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge.

Adanya pembentukan visi dan tujuan bersama para aktor

Adanya faktor pendorong bagi para aktor untuk ikut serta dalam kolaborasi

2) Kepemimpinan Fasilitatif

Adanya pemberian bimbingan kepada para aktor yang terlibat

3) Desain Institusional

Adanya penetapan aturan dasar

Adanya keterbukaan dalam proses kolaborasi

Tabel 1.2
Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub fenomena	Gejala	Informan
1	Proses Kolaborasi	Dialog Tatap Muka	1. <i>Stakeholders</i> yang terlibat 2. Adanya ruang komunikasi antar <i>stakeholders</i>	Pokdarwis Telaga Jonge, Kepala Desa Pacarejo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, masyarakat setempat, dan pelaku usaha.
		Membangun Kepercayaan	1. Adanya keterbukaan dalam proses kolaborasi antar <i>stakeholders</i> 2. Waktu yang dibutuhkan dalam membangun kepercayaan	Pokdarwis Telaga Jonge, Kepala Desa Pacarejo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, masyarakat setempat, dan pelaku usaha.
		Komitmen Terhadap Proses	1. Adanya sikap memiliki 2. Adanya ketepatan dalam melaksanakan tugas	Pokdarwis Telaga Jonge, Kepala Desa Pacarejo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, masyarakat setempat, dan pelaku usaha.
		Pemahaman Bersama	1. Pembentukan dan pemahaman nilai bersama 2. Misi dan tujuan yang jelas dalam kolaborasi	Pokdarwis Telaga Jonge, Kepala Desa Pacarejo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, masyarakat setempat, dan pelaku usaha.
		Hasil Sementara	1. Pembentukan rencana strategis	Pokdarwis Telaga Jonge, Kepala Desa Pacarejo,

			2. Evaluasi hasil kolaborasi	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, masyarakat setempat, dan pelaku usaha.
2	Faktor Pendukung dan Penghambat Proses <i>Collaborative Governance</i>	Kondisi Awal	1. Adanya pembentukan relasi yang terjalin antara pemerintah, masyarakat, dan swasta 2. Adanya pembentukan visi dan tujuan bersama para aktor 3. Adanya faktor pendorong bagi para aktor untuk ikut serta dalam kolaborasi	Pokdarwis Telaga Jonge, Kepala Desa Pacarejo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, masyarakat sekitar, pelaku usaha.
		Kepemimpinan Fasilitatif	1. Adanya pemberian bimbingan kepada para aktor yang terlibat	Pokdarwis Telaga Jonge, Kepala Desa Pacarejo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, masyarakat sekitar, pelaku usaha.
		Desain Institusional	1. Adanya penetapan aturan dasar 2. Adanya keterbukaan dalam proses kolaborasi	Pokdarwis Telaga Jonge, Kepala Desa Pacarejo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, masyarakat sekitar, pelaku usaha.

Sumber: Olahan Peneliti

1.7 Argumen Penelitian

Argumen penelitian berisi jawaban atas rumusan masalah yang berdasarkan pada teori terkait proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge. Telaga Jonge masih menghadapi berbagai masalah dalam pengelolaan objek wisata yang optimal. Model *collaborative governance*, seperti yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kolaborasi antar berbagai pihak sangatlah penting, seperti yang ditekankan oleh Sink (1998) yang dikutip oleh Zaenuri (2014). Mengingat dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge yang melibatkan beberapa pihak serta sempat terjadi konflik, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi proses kolaborasi serta faktor pendorong dan penghambatnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti akan menggambarkan, menggali, dan memahami informasi yang berasal dari individu yang terlibat dalam masalah dengan melakukan wawancara, merumuskan prosedur, mengumpulkan data, serta menganalisis dan menafsirkan makna dari data tersebut (Creswell, 2013). Pendapat Royce Singleton (1988) yang dikutip oleh Somantri (2005) menekankan bahwa pengembangan metode kualitatif adalah suatu proses yang terus berlanjut karena berkembang dari upaya memahami makna yang diberikan oleh fenomena sosial dan realitas, sehingga peneliti turut berpartisipasi secara aktif dalam memperkaya pemahaman dan makna sosial, serta terlibat dalam pertukaran informasi yang saling

berinteraksi. Penelitian memiliki tujuan menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge dan faktor pendukung serta penghambatnya, dengan harapan dapat memberikan solusi terhadap masalah pengembangan yang dihadapi.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge, lokus penelitiannya adalah Kawasan Telaga Jonge, Desa Pacarejo, dan Dinas Pariwisata Gunungkidul.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang memiliki peran sebagai penyedia informasi dan memiliki pemahaman tentang fenomena yang akan diteliti, sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Penelitian ini mengidentifikasi proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge.

Dalam penelitian ini, terdapat informan utama yang mampu memberikan deskripsi yang dapat dipercaya dan akurat. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang mempertimbangkan tujuan tertentu dan pemahaman terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menyebut mereka sebagai subjek riset, bukan objek, karena informan dianggap aktif dalam membangun realitas, berbeda dengan objek yang hanya mengisi kuesioner, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017).

Informan merupakan orang yang mampu memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berhubungan dengan pengelolaan objek wisata Telaga Jonge Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana pemilihan subjek penelitian didasarkan pada karakteristik spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam dari sampel yang homogen, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah Pokdarwis Telaga Jonge, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Desa Pacarejo, serta masyarakat setempat.

1.8.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2016), data kualitatif adalah data yang terdiri dari kata-kata, gambar, dan skema. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teks atau sekumpulan kata yang dapat menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ditemukan dalam penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama terdiri dari kata-kata dan tindakan. Data tambahan dapat berupa dokumen dan sumber lainnya. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud di sini adalah yang berasal dari individu yang diamati atau diwawancarai, yang berfungsi sebagai sumber data primer. Sumber data lain dapat

berupa dokumen tertulis (sekunder) dan dokumentasi seperti foto (Hardani dkk., 2020).

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Berdasarkan hal tersebut sumber data utama dalam penelitian ini ialah wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang langsung terlibat dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge dan observasi.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan berupa informasi yang melengkapi data primer. Informasi ini didapatkan dari buku, dokumen, dokumentasi, jurnal, artikel, maupun berita yang relevan dengan judul penelitian ini, serta dokumentasi foto yang berhubungan dengan teori *collaborative governance* dan pengembangan objek wisata khususnya Telaga Jonge.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menjadi salah satu teknik yang dapat dipergunakan dalam mengakumulasi data penelitian melalui komunikasi dua arah untuk mendapatkan informasi dari informan terkait topik penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara

terstruktur untuk mengajukan pertanyaan terkait proses *collaborative governance* serta faktor-faktor pendorong dan penghambat proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge kepada informan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengolahan data. Selain itu, peneliti juga menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan jawaban dan informasi yang lebih luas. Pendekatan ini sesuai dengan konsep wawancara bebas terpimpin yang dijelaskan oleh Arikunto (2016), di mana pertanyaan diajukan secara bebas tetapi tetap mengikuti standar wawancara yang telah ditetapkan, sehingga pertanyaan dapat berubah dan berkembang selama wawancara berlangsung.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan disertai dengan pencatatan tentang keadaan atau perilaku objek sasaran. Peneliti melakukan observasi langsung pada fakta dan fenomena yang ada di lapangan (Hardani dkk., 2020). Observasi akan dilakukan secara langsung oleh Peneliti di Kawasan objek wisata Telaga Jonge untuk menganalisis dan mencatat semua hal terkait proses kolaborasi dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi pelengkap dalam teknik pengumpulan data. Dokumentasi menurut Sugiyono (2018) ialah proses pengumpulan data dan informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, arsip, buku, gambar, dokumen, dan angka serta dapat berbentuk laporan yang mendukung topik

penelitian. Penelitian ini melakukan pengumpulan data dan informasi melalui arsip, jurnal, foto, karya tulis akademik, dan buku yang berhubungan dengan teori *collaborative governance* dan pengembangan objek wisata khususnya Telaga Jonge.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data ialah suatu proses mencari dan menyusun data yang didapat secara sistematis, menyusun dan mengorganisasikannya ke dalam pola serta membuat kesimpulan sehingga dapat memudahkan diri sendiri maupun orang lain yang membacanya (Sugiyono, 2018). Tahapan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan proses *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata Telaga Jonge Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.

2. Penyajian data

Menurut Sugiyono (2018), penyajian data adalah proses dimana data disajikan menggunakan berbagai metode seperti grafik, uraian, tabel, dan *flowchart* untuk mengatur data secara teratur. Hal ini bertujuan agar data tersusun dengan baik. Data mengenai fenomena yang sedang diteliti disajikan dalam bentuk

uraian, grafik, dan tabel yang memiliki pola tertentu sehingga memudahkan pemahaman dan analisis data.

3. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang melibatkan pengumpulan, pembersihan, pengorganisasian, interpretasi, dan penyajian data untuk mengidentifikasi pola, tren, atau informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses ini mencakup beragam metode statistik, teknik visualisasi data, serta alat analisis yang berbeda-beda, tergantung pada jenis data dan tujuan analisis.

4. Penarikan kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018), kesimpulan merupakan hasil dari jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat sejak awal. Namun, dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selalu dapat dipastikan karena rumusan masalah masih bersifat provisional dan dapat berubah ketika Peneliti melakukan penelitian lapangan. Oleh karena itu, kesimpulan adalah hasil temuan yang didukung oleh data yang valid dan konsisten. Kesimpulan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek, memiliki potensi untuk menjawab rumusan masalah, dan dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan.

1.8.8 Kualitas Data

Menurut Abdussamad (2021) dalam penelitian kualitatif memenuhi kriteria objektivitas maka dibutuhkan teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang mengintegrasikan beberapa teknik dan sumber yang

berbeda. Dalam proses ini, peneliti menguji kredibilitas data dengan memverifikasi informasi menggunakan berbagai teknik pengumpulan dan sumber yang berbeda.

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan memperhatikan validitas data. Sugiyono (2017) validitas merujuk pada tingkat kesesuaian antara data yang terjadi pada objek penelitian dan data yang dilaporkan oleh peneliti. Ini menunjukkan bahwa data yang valid adalah data yang konsisten antara laporan peneliti dan kenyataan yang ada. Untuk menilai validitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.

Selanjutnya data yang diperoleh dan dianalisis, dapat ditarik suatu kesimpulan. Moleong (2010) menjelaskan teknik triangulasi yang digunakan dalam menguji keabsahan data sebagai berikut:

1. Membandingkan data yang didapat bersumber dari observasi dan wawancaranya.
2. Membandingkan pernyataan yang disampaikan kepada khalayak dengan pernyataan yang disampaikan pribadi.
3. Membandingkan pendapat informan mengenai kondisi penelitian dengan apa yang disampaikan pihak terkait dalam kurun waktu penelitian.
4. Membandingkan data yang didapatkan dari wawancara dengan yang diperoleh dengan dokumen terkait.